



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUNARINI**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN KERJASAMA**
3. NHK : **972789**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.057.312.000**

1. Tanah Seluas 553 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI
Rp. 26.544.000
2. Tanah Seluas 266 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI
Rp. 12.768.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/78 m2 di KAB / KOTA KOTA
MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah Seluas 191 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, WARISAN
Rp. 68.000.000
6. Tanah Seluas 152 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **289.000.000**

1. MOBIL, NISAN SERENA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
175.000.000
2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	254.600.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	126.481.900
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.727.393.900
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.727.393.900

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.